



Psycho-Social Approach for Empowering Poor Communities with Disabilities

Pendekatan Psiko-Sosial untuk Memberdayakan Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas

Muhammad Ghazali Bagus Ani Putra^{1*}

¹Faculty of Psychology, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

There are many models of community empowerment but few are based on a psycho-social approach. Even though the psycho-social approach to empowering poor people with disabilities will be able to understand the psycho-social aspects of the people with disabilities who will be empowered. This study aims to analyze the role of the psycho-social approach in developing a model for empowering poor people with disabilities in East Java. The approach in this research is qualitative with the type of instrumental case study with the aim that the case under study will be a model for other cases. There were 8 interview participants who were involved in this study, consisting of 2 representatives from Bapemas East Java, 2 representatives from Bapemas Sidoarjo Regency and 4 representatives from the Joint Business Group (KUBE) whose members are persons with disabilities who are economically disadvantaged. Interview data were analyzed using thematic analysis so as to collect the role of psychology which became the basis for developing the empowerment model, namely social initiative (cognitive), synergy (affective) and sustainability (conative). This empowerment model was then developed by involving the role of a psycho-social approach to equip less well-off persons with disabilities to be more independent and have an economic impact on the surrounding community.

OPEN ACCESS

ISSN 2548 2254 (online)

ISSN 2089 3833 (print)

Edited by:

Lely Mariyati

Reviewed by:

Latipun Latipun
Cholicul Hadi

*Correspondence:

Muhammad Ghazali Bagus Ani Putra
baguz.putra@untag-sby.ac.id

Received: 29 December 2023

Accepted: 16 July 2024

Published: 25 December 2024

Citation

Muhammad Ghazali Bagus
Ani Putra (2024) *Psycho-
Social Approach for
Empowering Poor Communities
with Disabilities*

Psikologia : Jurnal Psikologi,
10(1).doi:
10.21070/psikologia.v10i1.1749

Keywords: empowerment for poor, community with disabilities, psycho-social approach

Banyak model pemberdayaan masyarakat namun sedikit yang mendasarkan pada pendekatan psiko-sosial. Padahal pendekatan psiko-sosial untuk pemberdayaan masyarakat miskin penyandang disabilitas akan mampu memahami aspek psiko-sosial penyandang disabilitas yang akan diberdayakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendekatan psiko-sosial dalam penyusunan model pemberdayaan masyarakat miskin penyandang disabilitas di Jawa Timur. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis studi kasus instrumental dengan tujuan agar kasus yang diteliti akan menjadi model bagi kasus yang lain. Partisipan wawancara yang terlibat dalam penelitian ini sejumlah 8 orang, yang terdiri dari 2 orang perwakilan Bapemas Jawa Timur, 2 orang perwakilan Bapemas Kabupaten Sidoarjo dan 4 orang perwakilan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang anggotanya adalah penyandang disabilitas berekonomi kurang mampu. Data wawancara dianalisis menggunakan analisis tematik sehingga mengumpulkan peranan psikologi yang menjadi dasar penyusunan model pemberdayaan, yaitu social initiative (kognitif), synergy (afektif) dan sustainability (konatif). Model pemberdayaan inilah yang kemudian disusun dengan melibatkan peran pendekatan psiko-sosial untuk pembekalan penyandang disabilitas kurang sejahtera untuk lebih mandiri dan membawa dampak keekonomisan bagi masyarakat sekitar.

Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat miskin, penyandang disabilitas, pendekatan psikososial

PENDAHULUAN

Pembangunan masyarakat adalah pembangunan sumber daya manusia yang utuh dan menjamin adanya perubahan yang positif sebagai daya dukung pembangunan bangsa itu sendiri. Banyak dimensi pembangunan yang harus diperhatikan untuk mencapai kondisi yang demikian. Dimensi 'kunci' yang harus diperhatikan salah satunya ialah 'manusia'. Apabila melihat kembali perjalanan konsepsi pembangunan, semakin mengarah kepada penanganan manusia sebagai objek sekaligus subjek pembangunan tersebut.

Dalam rangka pembangunan manusia, Indonesia perlu lebih banyak berinvestasi tidak hanya sekedar untuk memenuhi hak-hak dasar warganya tetapi juga untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi dan menjamin kesejahteraan psikologis dalam jangka panjang. Hal ini merupakan investasi jangka panjang yang signifikan dalam mendukung pembangunan bangsa.

Sebelum krisis, Indonesia cukup sukses dalam memenuhi sejumlah hak-hak dasar dan menterjemahkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ke dalam pembangunan manusia yang cepat dan merata. Namun demikian, keberhasilan ini sebagian besar dibiayai melalui belanja masyarakat, bukan belanja pemerintah. Dalam bidang kesehatan misalnya, Pemerintah hanya membiayai 20 persen anggaran, kurang dari separuh angka rata-rata di negara Asia Timur dan Pasifik. Karena manfaat belanja masyarakat cenderung lebih dirasakan oleh kelompok kaya, maka hal ini berdampak pada ketimpangan yang serius. Contohnya, angka kematian bayi di kalangan keluarga miskin, tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan kalangan keluarga kaya (Statistik, 2019). Cerminan kualitas sumberdaya manusia Indonesia dapat tergambar dalam indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu daerah.

Berdasarkan data BPS tahun 2019, jumlah masyarakat yang kurang sejahtera atau miskin semakin tahun semakin bertambah. Jumlah kemiskinan tahun 2018 mencapai 15,97% (35,01 juta jiwa) dan pada tahun 2019 sebesar 17,75% (39,05 juta jiwa). Bahkan kalau kita mencermati data BPS tahun 2019 untuk Provinsi Jawa Timur maka kemiskinan di Jawa Timur sebesar 21,91% dari jumlah total penduduk di Jawa Timur. Angka ini cukup besar jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta (3,42%), Banten (9,22%), Jawa Barat (13,38%), dan DIY (20,14%). Sedangkan Jawa Timur menempati posisi ke-22 dalam urutan IPM dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dengan demikian, jelas bahwa masyarakat miskin dan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur masih harus ditingkatkan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah diamanatkan bahwa semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan dampak dan hasil pembangunan yang merata dan berkeadilan. Tentu saja, dalam hal ini juga bagi penyandang disabilitas yang termasuk sebagai warga negara. Bahkan pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang no. 4 tahun 1997 tentang penyandang disabilitas (UU, 1997) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 43 tahun 1998

tentang upaya kesejahteraan penyandang disabilitas telah menjamin secara legal formal segala persamaan hak dan kedudukan para penyandang disabilitas dengan warga negara Indonesia yang lain. Kesamaan hak dan kedudukan itu antaranya ialah kesamaan dalam memperoleh pendidikan; (UU, 1998) pekerjaan dan penghidupan yang layak; berperan dan menikmati hasil-hasil pembangunan; aksesibilitas dalam mencapai kemandirian; rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; serta menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.

Berdasarkan jaminan aturan legal formal tersebut maka tugas pemerintah dan elemen-elemen masyarakat terkait ialah mengimplementasikan aturan tersebut sehingga betul-betul terlaksana dengan baik. Seperti misalnya memperjuangkan agar penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini harus diperhatikan pula oleh pihak swasta (perusahaan-perusahaan) sebagai mitra pemerintah agar mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuannya dengan mempertimbangkan kekurangan yang dimilikinya. Namun akan lebih baik lagi ketika pemerintah dan elemen masyarakat juga memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mencapai kemandirian sehingga tidak selalu tergantung dengan pihak-pihak lainnya.

Sementara itu menurut data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2018 terdapat 86.369 orang penyandang disabilitas yang sebagian besar diantaranya tergolong miskin atau kurang sejahtera. Oleh karena itu, peran pemerintah dan akademisi dibutuhkan untuk menyusun dan mengimplementasikan model pemberdayaan masyarakat miskin penyandang disabilitas yang mengakomodasi peran psikologi agar penyandang disabilitas lebih berdaya secara psikologis, sosial dan ekonomi.

Menurut (Willis, 2004), pemberdayaan masyarakat adalah suatu program untuk mendukung peningkatan produktivitas suatu organisasi. Dalam definisi tersebut masih kita rasakan adanya keuntungan sepihak, yaitu pada organisasi namun dengan kamufase pemberdayaan masyarakat. Secara sekilas program ini mencoba melakukan suatu rekayasa sosial untuk menanggapi adanya perubahan sosial dalam pembangunan. Adanya pembangunan ini akan membawa dampak terhadap segala aspek kehidupan manusia. Antisipasi ini salah satunya menurut Willis dilakukan dengan program pemberdayaan masyarakat

Sementara itu, (McKnight & Kretzmann, 2001), peneliti dari Asset Based Community Development (ABCD) Institute, menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu program rekayasa sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat menemukan potensi-potensi sehingga menjadi kebijakan lokal yang pada akhirnya dapat membantu mengembangkan kehidupan perekonomian lokal. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa program pemberdayaan masyarakat berangkat dari modal sosial untuk menemukan potensi-potensi lokal yang pada tujuannya untuk mengembangkan modal finansial.

Selain itu, Community Reinvestment Act Conference (CRA) mempunyai batasan yang lebih jelas tentang program pemberdayaan masyarakat, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam kesejahteraan materi dan immateri dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya pada masyarakat setempat. Dengan demikian, memberikan penekanan pada dua aspek dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu

aspek ekonomis dan aspek sosio-kultural.

- a. Aspek ekonomis; pemberdayaan masyarakat yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan materi yang didapatkan dari adanya organisasi atau perusahaan. Dalam aspek ini, masyarakat memiliki kesempatan dalam meningkatkan taraf hidupnya atau memperoleh keuntungan materi dari adanya perusahaan tersebut. Bahkan dalam beberapa fenomena industrial, masyarakat sekitar perusahaan mendapatkan kesempatan untuk menjadi karyawan atau mengolah produksi yang standarnya telah ditetapkan dan diorganisasikan oleh perusahaan tersebut. Tentu saja, keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat setempat adalah adanya lapangan pekerjaan atau peluang karya mendatangkan penghasilan, baik tetap maupun tidak tetap.
- b. Aspek sosio-kultural; tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap perubahan sosial meskipun bernama pembangunan dengan tujuan yang positif namun tentu saja membawa dampak yang mungkin merugikan bagi keberlangsungan budaya masyarakat yang bernilai positif. Banyak fenomena yang menunjukkan bahwa nilai-nilai positif masyarakat, seperti gotong royong, toleransi, kerelaan dapat terkikis dengan munculnya peningkatan kesejahteraan materi masyarakat. Dalam masyarakat yang telah dirambah oleh pembangunan industri menyebabkan adanya pergeseran nilai-nilai karena segala sesuatu dihargai dengan materi (materialistis). Program pemberdayaan masyarakat yang ditawarkan harus menekankan kepada aspek sosio-kultural yaitu membuat suatu perubahan kemajuan tanpa mengikis nilai-nilai positif yang telah dibangun oleh masyarakat terdahulu.

Sedangkan menurut (Hibberd & Harker, 2001) aspek dalam pemberdayaan masyarakat terangkum dalam 3 aspek dinamis, yaitu :

- a. Ekonomi; yaitu program pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada kondisi ekonomis suatu komunitas, mulai dari faktor perencanaan, implementasi dan pengembangan dari komunitas terkecil dalam masyarakat (keluarga) sebagai dasar pengembangan masyarakat secara makrosistem.
- b. Ekologi; yaitu bentuk hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya. Dalam aspek ini program pemberdayaan masyarakat lebih menekankan pada sumber daya alam untuk mendukung kelangsungan hidup masyarakat.
- c. Equity; yaitu prinsip keseimbangan antara manusia, kelompoknya dan generasi berikutnya. Dalam hal ini, dibutuhkan ketergantungan (interdependency) antara manusia sebagai mikrosistem dengan lingkungan sosialnya bahkan dengan kelompok generasi berikutnya (sustainability).

Dinamika ketiga aspek inilah yang menentukan bagaimana suatu komunitas memilih langkah hidup mereka untuk masa depan. Ketiga aspek ini akan berjalan ketika terdapat pemilihan permasalahan sosial yang berlaku dalam komunitas. Dengan demikian, kebutuhan pengembangan masyarakat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini

senada dengan yang diungkap oleh (Taylor & West, 2001) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan program yang kebutuhannya muncul dari komunitas itu sendiri dan pengembangannya secara berkelanjutan untuk menunjang kesejahteraan sosial.

(Ani Putra, 2006) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dilakukan penyatuan tema yang berkaitan dengan kajian psiko-sosial, yaitu;

1. Equity, yaitu konsep keseimbangan yang proporsional dalam menciptakan peluang kerja tanpa mengabaikan tuntutan kompetensi dalam rangka memperluas kesempatan kerja. Selanjutnya, perluasan kerja ini yang akan meningkatkan kesejahteraan material masyarakat. Bahkan menurut equity theory, segala aspek kehidupan ini membutuhkan suatu keseimbangan untuk mewujudkan perilaku. Jika perluasan kesempatan kerjanya semakin tinggi maka akan menggerakkan sektor yang lain, seperti halnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Acculturation in cross cultural psychology, yaitu proses meleburnya globalisasi teknologi informasi yang masih mempertahankan nilai-nilai positif dalam masyarakat. Kondisi ini akan menunjang tercapainya keberlangsungan asset budaya dalam masyarakat. Seringkali terjadi jika pembangunan berlaku maka akan terjadi banyak perubahan, termasuk budaya yang berwujud dengan gaya hidup masyarakat. Sebagai contoh, adanya pembangunan infrastruktur menjadikan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin materialistis. Hal ini merupakan kajian cross cultural psychology untuk dapat meminimalisir luntarnya nilai-nilai positif masyarakat yang dapat mendukung pembangunan modal manusia.
3. Interdependency psychology, yaitu ketergantungan antar semua pihak yang berkaitan sehingga menimbulkan hubungan yang saling menguntungkan, baik antara pihak masyarakat, organisasi maupun dengan komunitas yang lain. Kondisi ini menyebabkan manfaat dan daya guna bagi semua pihak yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat.
4. Social initiative, yaitu proses munculnya kepentingan untuk memberlakukan program pemberdayaan masyarakat, melaksanakan, mengevaluasi dan mengimplementasikan secara komprehensif dari komunitas itu sendiri. Hal ini disebabkan bahwa komunitas itu sendiri yang mengetahui adanya kepentingan dalam rangka memunculkan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya social initiative ini, maka masyarakat akan tergerak merencanakan, menggerakkan dan mempertahankan keberlangsungan pemberdayaan masyarakat.
5. Adaptable behavior pattern, yaitu keberlanjutan dalam melangsungkan perilaku-perilaku masyarakat sebagai hasil pemberdayaan masyarakat yang positif. Jika pemberdayaan masyarakat ini berlanjut menjadikan penggerak modal finansial dan modal sosial yang telah direncanakan sejak awal diberlakukan.

Pada pendekatan psiko-sosial yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat ini jika dijalankan secara sinergis dapat mengakomodasi fungsi masing-masing prinsip tersebut.

METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dalam situasi yang wajar atau dalam natural setting. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kasus. Tipe penelitian ini ialah studi kasus instrumental. Studi kasus instrumental ialah kajian terhadap suatu kasus yang khusus dan menjadikan pola-pola yang terjadi pada objek kajian tersebut untuk memahami kasus/ fenomena yang lebih luas lain (Yin, 2005). Oleh karena itu, tipe ini juga mengembangkan dan memperhalus teori yang telah ada. Penelitian ini menumpukan perhatian terhadap pendekatan kajian kasus eksplanatoris karena berdasarkan tipe pertanyaan penelitian, yaitu mengacu pada *how* (bagaimana). Tahapan penelitian ini terdiri dari pemilihan kasus, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data penelitian.

Pada kajian ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan realitas sosial dengan memberikan gambaran model ideal suatu program pemberdayaan penyandang disabilitas miskin melalui pendekatan psiko-sosial. Kemudian menggambarkan suatu proses, mekanisme atau hubungan dan memberikan gambaran verbal serta tingkah laku, mendapatkan informasi untuk menstimulasi penjelasan-penjelasan baru, memperlihatkan informasi dasar, serta menjelaskan informasi yang mungkin berlawanan dengan pandangan awal mengenai suatu obyek kajian bersama.

Metode Pengumpulan Data dan Partisipan

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Dokumentasi data, penelitian ini menggunakan dokumentasi data mengenai kebijakan pemerintah pusat dan daerah mengenai penyandang disabilitas kurang sejahtera, data-data statistik mengenai kondisi riil masyarakat penyandang disabilitas kurang sejahtera dan kajian lepas lainnya yang membahas mengenai profil, potensi serta permasalahan psiko-sosial disabilitas kurang sejahtera.
2. Wawancara dengan teknik terbuka-terarah (*open-ended interview*) terhadap 2 orang perwakilan Bapemas Jawa Timur, 2 orang perwakilan Bapemas Kabupaten Sidoarjo dan 4 orang perwakilan dua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Sidoarjo yang anggotanya adalah penyandang disabilitas berekonomi kurang sejahtera.
3. Catatan lapangan (*field notes*) ialah suatu alat bantu untuk merekam fenomena dan peristiwa-peristiwa di lapangan yang dapat mendukung terhadap objek kajian yang sedang diteliti. Selain menggunakan catatan lapangan manual, tim peneliti juga menggunakan alat bantu rekam, seperti video camera dan voice recorder.

Teknik Analisis Data

Semua sumber data pada penelitian ini, baik data dokumentasi, data catatan lapangan, data wawancara akan dianalisis menggunakan analisis tematik. Analisis tematik

merupakan proses mengkodekan informasi yang dapat menghasilkan daftar tema, model tema atau indikator yang kompleks, kualifikasi yang berkaitan dengan tema itu atau perkara-perkara tunggal atau gabungan dari perkara yang telah disebutkan (Poerwandari, 2007)

Pola atau tema tersebut nampak seolah secara acak dalam kumpulan informasi yang telah ada. Setelah peneliti menemukan pola (*seeing*), peneliti akan mengklasifikasi atau mengkodekan pola tersebut (*seeing as*) dengan memberi label, definisi atau deskripsi (Poerwandari, 2007). Dalam upaya menganalisis data, suatu tema dapat diidentifikasi pada peringkat wujud (*manifest level*), yaitu secara eksplisit dapat terlihat. Suatu tema juga dapat ditemukan pada peringkat terpendam (*latent level*), yaitu tidak secara eksplisit nampak tetapi membayangi atau memberikan dasar terhadap tema tertentu. Tema-tema dapat diperoleh secara induktif dari data informasi atau dapat diperoleh secara deduktif dari teori atau kajian lepas (Poerwandari, 2007).

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis tematik pada penelitian ini, ialah;

1. Membaca transkrip secara keseluruhan; peneliti mesti membaca keseluruhan teks dengan pemikiran yang terbuka, tanpa sikap yang khusus, dalam usaha memahami ungkapan dan pengalaman partisipan dan untuk mendapatkan perasaan yang menyeluruh terhadap transkrip wawancara.
2. Melakukan koding pada teks transkrip yang mempunyai makna. Pada langkah ini informasi dipadatkan sehingga menemukan padatan faktual. Langkah ini memudahkan peneliti menemukan tema maupun kategorisasinya.
3. Menemukan dan melakukan kategorisasi tema. Berasal dari padatan faktual atau informasi yang berharga maka dapat ditemukan tema. Tema tersebut ditemukan secara induktif dari informasi yang diperoleh. Tema dapat sesuai dengan teori yang telah ada namun dapat menjadi tema-tema baru yang dapat memperkaya atau menghaluskan teori. Setelah tema-tema ditemukan maka dapat dilakukan kategorisasi tema, terlebih jika teori pada kajian rintis atau kajian lepas berlaku hal yang sama.

Dari 12 KUBE penyandang cacat mandiri yang ada di Kabupaten Sidoarjo, terpilih 4 KUBE yang masih bertahan dan berhasil dalam produksi usaha riil namun belum mampu memasarkan produknya secara optimal.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pemberdayaan penyandang disabilitas di kabupaten Sidoarjo telah dilakukan sejak tahun 2001. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo merupakan *leading sector* bidang penanganan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Penanganan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo diantaranya adalah menyediakan fasilitas pendidikan sekolah luar biasa (SLB). Tujuan utama dari sekolah luar biasa ini adalah mengoptimalkan kemampuan akademik dan khususnya ketrampilan kerja para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas diharapkan dapat memperoleh bekal ketrampilan kerja dan selanjutnya dapat mandiri dalam hal ekonomi.

Salah satu sekolah luar biasa itu adalah SMA Luar Biasa “Putra Mandiri”, Lebo, Sidoarjo. Para penyandang disabilitas di SMA Luar Biasa “Putra Mandiri” secara khusus diberi ketrampilan kerja diantaranya menjahit, mengelas, mengecat airbrush, beternak kambing, menyulam dan kerajinan kayu (Dalal, 2010). Para penyandang disabilitas yang telah lulus dari SMA Luar Biasa “Putra Mandiri” sebagian berharap mendapatkan kerja di bidang industri yang berada di sekitar Sidoarjo. Sebagian yang lain diharapkan memulai usaha mandiri (berwiraswasta). Penanganan upaya usaha para penyandang disabilitas oleh Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan membentuk KUBE (kelompok usaha bersama). KUBE adalah kelompok usaha penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan modal kerja, fasilitas, dan pendampingan usaha oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo (MDC, 2002).

Pada wawancara yang dilakukan di kedua lokasi sasaran tersebut maka didapatkan beberapa temuan sebagai berikut;

1. Model pemberdayaan penyandang disabilitas melalui KUBE belum sepenuhnya diketahui oleh struktur pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo, khususnya oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) dan Dinas Sosial sebagai leading sector pada program pemberdayaan penyandang disabilitas ini. Namun program KUBE ini telah dirintis oleh kedua lembaga pemerintah tersebut sejak tahun 2007.
2. Belum adanya perhatian khusus dari pemerintah kelurahan setempat terhadap penyandang disabilitas yang berada di lokasi kelurahan tersebut. Seperti tidak adanya pendataan latar belakang sosial demografis dan spesifikasi kemampuannya.
3. KUBE yang telah terbentuk belum mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat.
4. KUBE yang telah terbentuk mempunyai inisiatif untuk melakukan pertemuan rutin untuk pengembangan diri, saling mengasah keterampilan dan melakukan jejaring kerjasama usaha dengan masyarakat.
5. KUBE Loka 2 yang mempunyai usaha di bidang servis elektronika mempunyai 10 anggota yang domisilinya tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Mereka mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan modal tambahan dan jejaring kerjasama dengan dunia usaha/ dunia industri (DU/DI).
6. KUBE Mandiri di Lebo Sidoarjo bergerak dalam bidang kerajinan. KUBE Mandiri adalah kelompok usaha bersama yang terdiri atas penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna grahita. Anggota KUBE Mandiri sebanyak sepuluh (10) orang dengan bermacam usaha diantaranya percetakan, sablon, dan tata boga. Seorang staf pengajar dan kepala sekolah SMA Luar Biasa “Putra Mandiri” sekaligus pembina KUBE Mandiri menyatakan bahwa usaha pemberdayaan ekonomi anggota KUBE Mandiri

memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut terletak pada faktor penyandang disabilitas itu sendiri, manajemen usaha, dan kelemahan faktor koordinasi antar dinas pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terkait upaya pemberdayaan penyandang disabilitas. Partisipasi lainnya menyatakan bahwa kelemahan upaya memberdayakan para penyandang disabilitas adalah aspek ketiadaan modal kerja, kurangnya fasilitas kerja, lemahnya manajemen usaha, pemasaran, dan pendekatan pemberdayaan yang tidak komprehensif.

7. Adanya daya dukung dari organisasi non pemerintah, yaitu Paguyuban Penyandang Disabilitas Mandiri Sidoarjo yang memfasilitasi pertemuan rutin seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo dengan intensitas sebulan sekali di KUBE Mandiri, Lebo, Sidoarjo. Pertemuan ini lebih terfokus sebagai upaya mempersatukan kegiatan-kegiatan penyandang disabilitas, memfasilitasi pelatihan keterampilan usaha, keterampilan psiko-sosial dan membuka usaha kemitraan dengan konsumen atau pelanggan secara langsung.
8. Adanya konsep diri yang positif pada penyandang disabilitas yang telah sekian lama memiliki kedisabilitas atau disabilitas sejak lahir. Penyandang disabilitas seperti ini yang mempunyai ketangguhan dalam berusaha serta memotivasi rekan senasibnya untuk terus berkarya.

Berdasarkan temuan ini tersebut maka analisis penyusunan model pemberdayaan penyandang disabilitas sebelumnya mempunyai kekurangan sebagai berikut;

1. Tahap sosialisasi dan pengenalan awal mengenai program pemberdayaan penyandang disabilitas yang kurang intensif sehingga aparat pemerintah di kabupaten/ kota, kecamatan dan kelurahan tidak banyak mengetahui mengenai model tersebut.
2. Keterlibatan leading sector pada program tersebut perlu ditingkatkan sehingga tidak kalah peran sertanya dibandingkan dengan organisasi non pemerintah seperti Paguyuban Penyandang Disabilitas Mandiri (PPDM) Sidoarjo.
3. Pada model pemberdayaan sebelumnya, belum dibahas secara kongkret upaya membangun jejaring usaha yang melibatkan unsur perusahaan atau investor yang dapat memasarkan atau menampung hasil usaha KUBE.

Berdasarkan temuan dan permasalahan tersebut maka secara ideal maka disusunlah Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas melalui pendekatan Psiko-Sosial berikut;

[Figure 1. About here.]

Secara rinci tahap dan kegiatan yang dilakukan pada modifikasi model pemberdayaan penyandang disabilitas melalui KUBE ini ialah:

1. Tahap Awal (Social Initiative)

Pada tahap awal ini leading sector pemerintah melakukan identifikasi sasaran terhadap kelompok penyandang disabilitas kurang sejahtera sebagai calon KUBE. Kemudian diberikan pelatihan keahlian dan intervensi psikologis agar siap dalam persaingan usaha dan menumbuhkan kemandirian. Pada tahap awal ini perlu penglibatan dinas terkait dan jaringan kemitraan dunia

usaha/ dunia industry untuk pembekalan awal.

2. Tahap Lanjutan (Synergy)

Tahap lanjutan ini ialah keberlanjutan dari tahap awal yang sarannya ialah penyandang disabilitas yang pada tahap awal dan berada pada lokasi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tahap lanjutan ini dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut;

a. Pembentukan KUBE

Pembentukan KUBE ini diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan yang kuat sebagai bentuk upaya menciptakan; (i) struktur dan personalia pengurus, (ii) penyempurnaan AD/ART, (iii) peningkatan kapasitas manajemen organisasi, (iv) peningkatan legalitas KUBE, (v) jaringan kerjasama antar KUBE dan dunia usaha/ dunia industri.

b. Permodalan (capital stimulant)

Pada kegiatan pemberian modal ini dimaksudkan untuk memberikan modal sebagai perangsang (stimulant) pada KUBE. Nominal modal ditentukan oleh jenis usaha yang diusulkan dan perhitungan Return on Investment (RoI). Pemberian modal ini hanya sebagai stimulasi agar penyandang disabilitas dapat menggunakannya sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya dan telah dibekalkan dalam skill-treatment sebelumnya. Hal ini dilakukan agar penyandang disabilitas lebih mempunyai kemandirian dalam pengembangan usahanya.

c. Pendampingan dan konsultasi

KUBE yang telah diberikan modal stimulan masih perlu dibantu dalam pengelolaan usaha. Hal ini bertujuan agar KUBE dapat berjalan secara produktif. Pendampingan dan konsultasi ini dapat dilakukan oleh pihak perguruan tinggi, LSM, maupun SKPD Kota/ Kabupaten.

d. Pengembangan sistem keterjaminan sosial melalui KUBE

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kemampuan KUBE dalam membangun sistem keterjaminan sosial secara mandiri dan keberlanjutan. Kegiatan ini dilakukan melalui penyisihan sisa hasil usaha (SHU) maupun pendayagunaan potensi masyarakat setempat, seperti infak, zakat, shodaqoh maupun bantuan sosial lainnya.

3. Tahap Pemandirian (Sustainability)

Tahapemandirian adalah suatu tahapan untuk mengantarkan KUBE berkategori SEHAT yang telah mampu mengelola usaha dengan baik menjadi KUBE mandiri. Pengelolaan tahap ini dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/ kota dengan menetapkan berbagai bentuk kegiatan pembinaan sesuai dengan karakteristik usaha dan pengembangan usaha masing-masing KUBE .

Beberapa kegiatan dalam tahapan ini antara lain: (i) pembentukan KUBE menjadi home industry, (ii) pengembangan akses permodalan, manajemen, teknologi dan pemasaran yang melibatkan dunia usaha/ dunia industri, (iii) bantuan teknis dari pemerintah maupun dunia usaha/ dunia industri. Sedangkan pemerintah provinsi berperan memberikan fasilitasi dalam bentuk penyediaan tenaga konsultan pengembangan KUBE, monitoring dan evaluasi bersama dengan dunia usaha/ dunia industri. Disinilah arti pentingnya sinergisitas antara penyandang disabilitas, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/ dunia industri (DU/DI) (Mathias et al., 2020).

Keterlibatan masyarakat sasaran sebagai subyek pembangunan ditunjukkan dengan jaring aspirasi dan kebutuhan serta disesuaikan dengan keahlian kelompok masyarakat sasaran. Hal inilah yang disebut sebagai social initiative. Berdasarkan aspek keterlibatan komunitas, praktek pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk, yaitu (Primahendra, 2004) :

- a. Development for community, yaitu bentuk pemberdayaan masyarakat yang menekankan komunitas atau masyarakat sebagai objek pembangunan. Oleh karena itu, aktor utama yang berperan dalam pemberdayaan ini adalah unsur lain dari luar masyarakat itu sendiri. Dalam terminologi ini, biasanya boleh terjadi ketergantungan dari salah satu pihak yaitu komunitas saja karena hanya sebagai objek dalam pemberdayaannya.
- b. Development with community, yaitu bentuk pemberdayaan masyarakat yang ditandai dengan kuatnya pola kolaborasi antara aktor luas dan masyarakat. Kebijakan dan program ditentukan oleh kedua belah pihak dan sumber daya yang dipakai berasal dari kedua belah pihak juga. Dalam terminologi ini, telah terjadi hubungan yang sinergis antara komunitas dan aktor luar (perusahaan, organisasi, pemerintah).
- c. Development of community, ialah proses pemberdayaan yang inisiatif, perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh masyarakat untuk membangun dirinya sendiri. Peran aktor dari luar komunitas dalam terminologi ini lebih sebagai sistem pendukung bagi proses pembangunan.

Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut maka dapat diperjelaskan dengan tabel sebagai berikut;

[Table 1. About here.]

Ketiga pendekatan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu peningkatan kualitas hidup dan kelembagaan masyarakat sebagai ‘korban’ pembangunan. Perbedaan yang berlaku lebih pada efektivitas pendekatan yang berhubungan dengan konteks dan karakteristik masyarakat atau komunitas yang dihadapi. Pada masyarakat tertentu mungkin pendekatan Development for Community lebih sesuai, sementara pada masyarakat dengan karakteristik tertentu, Development with Community justru yang dibutuhkan. Faktor utama yang menentukan pemilihan ketiga pendekatan tersebut adalah seberapa jauh kelembagaan masyarakat telah berkembang. Pada masyarakat yang kelembagaannya telah berkembang dan mapan, pendekatan Development of Community akan lebih sesuai.

Ataupun ketiga pendekatan ini dapat dilakukan secara bertahap ketika diterapkan dalam pembangunan kelembagaan masyarakat yang berkesinambungan. Namun secara kontekstual Development of Community dapat disejajarkan dengan pendekatan psiko-sosial social initiative.

Untuk memastikan kelancaran program pemberdayaan masyarakat maka terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu (Primahendra, 2004);

- a. Pemberdayaan masyarakat adalah proses “grass-root”, yaitu program-program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pada masyarakat lokal. Oleh karena itu, program yang dilaksanakan merupakan proses bottom-up dan bukanlah top-down.
- b. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah menjadikan masyarakat lebih swadaya (self-reliance). Banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kenyataannya justru menumbuhkan ketergantungan masyarakat lokal terhadap aktor luar. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat harus mempunyai program kemandirian masyarakat.
- c. Learning communities. Masyarakat atau komunitas dituntut untuk mampu belajar dari pengalaman sendiri serta mampu melakukan identifikasi terhadap potensi-potensinya sendiri untuk menjawab tantangan dinamika perkembangan zaman.
- d. Berkurangnya tingkat kemiskinan. Jika kita kembali kepada roh pemberdayaan masyarakat adalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik kesejahteraan materi maupun non materi.
- e. Terciptanya peluang ekonomi dan mata pencaharian yang berkelanjutan. Dengan stimulasi dari program pemberdayaan masyarakat maka diharapkan akan menumbuhkan dan mengairahkan ekonomi mikro sehingga menjadi mata pencaharian yang berkelanjutan.
- f. Menguatnya modal sosial. Modal sosial digunakan sebagai landasan untuk mencapai modal finansial secara makrosistem.
- g. Tercapainya keseimbangan tujuan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Dalam kenyataannya, sering terjadi program pemberdayaan masyarakat justru mengubah keseimbangan elemen-elemen dalam masyarakat. Jika hal ini terjadi maka dalam jangka panjang akan merugikan komunitas sendiri. Pemberdayaan masyarakat sebaiknya dilaksanakan dengan mempertahankan perspektif keseimbangan yang ada dalam local community. Suatu contoh, bagaimana konsep penerapan program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah industri secara ekonomi namun tetap tidak mengubah kegotongroyongan masyarakat. Justru tantangan bagi pemberdayaan masyarakat untuk mempertahankan perilaku ekonomi yang mempunyai muatan local wisdom.

Jika pembangunan komunitas dapat mempertahankan prinsip dasar ini maka tujuan pemberdayaan masyarakat

yang mandiri bisa tercapai. Sedangkan (Skinner, 1997) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut;

1. Program yang berdasarkan pada isu yang diidentifikasi muncul dalam komunitas. Dengan demikian, anggota komunitas merasakan mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkannya secara berkelanjutan
2. Membantu anggota komunitas untuk memahami latar belakang isu yang mereka harapkan untuk diatasi dan pemahaman terhadap latar belakang potensi kelompok lain dapat mempunyai kekuatan untuk mengatasinya daripada komunitas yang lain
3. Bekerja untuk perubahan yang meminimalisasi ketidakseimbangan dan kemiskinan
4. Program yang diberlakukan dalam prinsip ketergantungan atau kerjasama mutualisme dengan lapisan masyarakat lain
5. Program pemberdayaan masyarakat harus merupakan langkah yang berkelanjutan (sustainability program) untuk mendatangkan manfaat bagi generasi selanjutnya
6. Diskusi yang kontinyu dari aktor-aktor yang terlibat terhadap pengambilan keputusan dari isu yang ada
7. Suka rela, yaitu tidak ada pemaksaan antara subyek atau aktor pemberdayaan masyarakat dengan obyek kajian pemberdayaan masyarakat untuk mengidentifikasi isu dan dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat sebagai pemecahan masalah.

Dengan demikian, jelaslah ciri-ciri dari pemberdayaan masyarakat haruslah mempunyai prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip tersebut jika dirangkum akan menghasilkan 3 tema pendekatan psiko-sosial, yaitu social initiative, synergy dan sustainability.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan dari hasil temuan tersebut maka disimpulkan bahwa:

1. Model pemberdayaan masyarakat miskin penyandang disabilitas ini lebih mengarah kepada 3 pendekatan psiko-sosial yaitu program yang berinisiatif dari penyandang disabilitas itu sendiri (social initiative), mampu bekerjasama dengan pihak lain khususnya dunia usaha/ dunia industri (synergy) dan pelestarian program berkelanjutan (sustainability).
2. Untuk mendapatkan pendekatan synergy dan sustainability maka perlu adanya kemitraan dunia usaha/ dunia industri yang tidak hanya pada aspek pemasaran tetapi juga pelatihan keterampilan, proses pemberdayaan dan proses evaluasi - monitoring agar terbina kerjasama yang sinergis dan kemandirian penyandang disabilitas.

Sedangkan untuk implementasi dan keberlangsungan model ini maka peneliti menyarankan:

1. Kepada pihak pemerintah; perlu adanya tindak lanjut dan implementasi yang berkesinambungan dalam pelaksanaan model dan program pemberdayaan penyandang disabilitas ini. Selain itu, sosialisasi awal yang intensif merupakan kunci utama keberhasilan model dan program pemberdayaan penyandang disabilitas melalui KUBE ini.
2. Kepada pihak dunia usaha/ dunia industri; perlu adanya

program kemitraan sebagai penyelenggara pelatihan keterampilan dan membantu aspek pemasaran jasa dan barang yang dihasilkan oleh KUBE. Hal ini merupakan amanah dalam pelaksanaan corporate social responsibilities (CSR).

3. Kepada penyandang disabilitas; perlu meningkatkan konsep diri dan motivasi berprestasi agar tetap mampu berusaha dalam kemampuannya masing-masing. Serta perlu meningkatkan kompetensi yang spesifik dan disesuaikan dengan segmentasi pasar sehingga mudah dalam menjalin hubungan kerjasama dengan dunia usaha/ dunia industri atau masyarakat sebagai konsumennya secara langsung.
4. Kepada masyarakat; agar dapat membantu program pemerintah dalam rangka pemberdayaan penyandang disabilitas melalui KUBE sebagai konsumen produk KUBE sehingga dapat meraih kemandirian program tersebut.

REFERENSI

- Ani Putra, M. G. B. (2006). The role of psycho-social aspects in community development program. *International Conference on Community Development*.
- Dalal, A. K. (2010). Disability–poverty nexus: Psycho-social impediments to participatory development. *Psychology and Developing Societies*, 22(2), 409–437.
- Hibberd, J., & Harker, D. (2001). Communities by choice (economy, ecology, equity). Mountain Association for Community Economic Development and Communities by Choice. *Inc*.
- Mathias, K., Pillai, P., Gaitonde, R., Shelly, K., & Jain, S. (2020). Co-production of a pictorial recovery tool for people with psycho-social disability informed by a participatory action research approach—A qualitative study set in India. *Health Promotion International*, 35(3), 486–499.
- McKnight, J., & Kretzmann, J. (2001). *Promoting social inclusion for young people affected by psycho-social disability in India—a realist evaluation of a pilot intervention*. <http://www.northwestern.edu/ipr/research/resurban.html>.
- MDC, I. (2002). *The building block of community development*. <http://www.mdcinc.org>.
- Poerwandari, E. K. (2007). *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia (Edisi ketiga)*. LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Primahendra, R. (2004). *Data Biro Studi dan Komunikasi Bina Swadaya*.
- Skinner, S. (1997). *Building community strengths: A resource book on capacity building*. <http://www.cdf.org.uk>.
- Statistik, B. P. (2019). *Data Nasional Pembangunan Manusia*.
- Taylor, M., & West, A. (2001). *Signposts to community development*. <http://www.cdf.org.uk>.
- UU 43 Tahun 1998 tentang Upaya Kesejahteraan Penyandang Cacat.

UU 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Willis, M. A. (2004). *Development of a psycho-social intervention for reducing psychological distress among parents of children with intellectual disabilities in Malawi*. <http://www.jporganchase.com/cm/cs?pagename=Chase/Href&urlname=jpmc/community/cdg/articles51>.

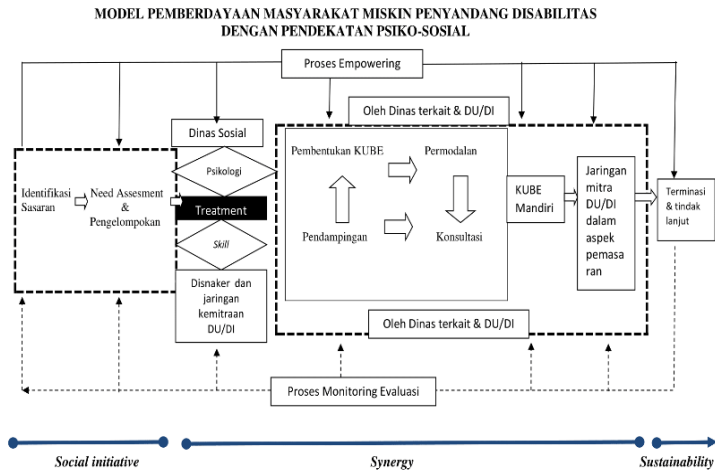
Yin, R. K. (2005). *Studi kasus (desain dan metode)*. PT. Raja Grafindo Persada.

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Muhammad Ghazali Bagus Ani Putra. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

LIST OF FIGURE

1. Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas dengan Pendekatan Psiko-Sosial5



Bagan 2. Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas Dengan Pendekatan Psiko-sosial

Figure 1 / Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas dengan Pendekatan Psiko-Sosial

LIST OF TABLE

1. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat6

Table 1/ Keterlibatan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat

	Development for Community	Development with Community	Development of Community
Aktor Utama	Aktor dari luar	Bersama dengan masyarakat lokal	Masyarakat lokal
Bentuk Hubungan	Sosialisasi - Konsultasi	Kolaborasi	Self-Mobilization, Empowerment
Decision Maker	Aktor dari luar	Aktor dari luar bersama masyarakat lokal	Masyarakat lokal
Pelaksana	Aktor dari luar	Aktor dari luar bersama masyarakat lokal	Masyarakat lokal
Bentuk Kegiatan	Proyek	Proyek dan Program	Pengembangan sistem dan kelembagaan

